

Strategi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Merauke (*Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM*)

Franti Mutiara Pricylia Fofied¹⁾, Coleta Maskikit²⁾, Khoriyatun³⁾

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi karya Dharma Merauke, Papua Selatan, Indonesia
email: frantimutiaraaa@gmail.com¹⁾ coletamaskikit@gmail.com²⁾ khoriya1410@gmail.com³⁾

(Diterima Januari 2026); Disetujui Februari 2026); Dipublikasikan Maret 2026)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal di Kabupaten Merauke. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Pedagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke. Fokus penelitian menggunakan perumusan strategi pengembangan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal antara lain: misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki semangat tinggi untuk berwirausaha sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, mereka masih menghadapi kendala seperti proses perizinan yang dianggap rumit, lambatnya pencairan bantuan modal usaha, kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha. Strategi yang dilakukan oleh pemuda dalam memajukan usaha mereka mencakup promosi melalui media sosial, pengembangan produk, dan pengelolaan usaha secara mandiri. Sementara itu, pihak Dinas Perindakop telah berupaya mendukung melalui program bantuan dan pelatihan, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kesimpulannya bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal, dan karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha muda dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kewirausahaan pemuda, UMKM, strategi pengembangan, ekonomi lokal Kabupaten Merauke.

Abstract

The purpose of this study was to determine the Youth Entrepreneurship Development Strategy in Supporting Local Economic Development in Merauke Regency. Using a descriptive qualitative research approach. The research location was at the Merauke Regency Department of Industry and Trade, Cooperatives and SMEs. The focus of the research used the formulation of development strategies in developing youth entrepreneurship in supporting local economic development, including: mission, objectives, strategies, and policies. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was qualitative data analysis. The results of the study showed that young people have a high enthusiasm for entrepreneurship as a form of economic independence and contribution to regional development. However, they still face obstacles such as the licensing process which is considered complicated, slow disbursement of business capital assistance, lack of training and business mentoring. Strategies used by young people in advancing their businesses include promotion through social media, product development, and independent business management. Meanwhile, the Department of Industry and Cooperatives has attempted to support through assistance and training programs, but its implementation still faces budget and resource limitations. In conclusion, youth entrepreneurship development plays a crucial role in strengthening the local economy, and therefore requires synergy between local governments and young entrepreneurs to create a sustainable entrepreneurial ecosystem.

Keywords: Youth entrepreneurship, UMKM, development strategy, local economy of Merauke Regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut adalah kewirausahaan, khususnya di kalangan pemuda, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal (Suryana, 2013; Alma, 2016). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan (Tambunan, 2012). Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Kuncoro, 2010). Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Strategi pengembangan kewirausahaan pemuda perlu mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan dan pelatihan, akses terhadap modal, serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif. Program pemerintah seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan berbagai inkubator bisnis menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen strategis, Wheelen dan Hunger (2002) menyatakan bahwa strategi pengembangan merupakan perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui berbagai inisiatif pertumbuhan. Selain itu, strategi juga dipahami sebagai upaya menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan yang terencana dan terintegrasi dengan tujuan organisasi (Robbins & Coulter, 2012).

Perumusan strategi pengembangan kewirausahaan meliputi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, khususnya wirausaha muda Orang Asli Papua (OAP), melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal usaha. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Strategi yang diterapkan meliputi pendampingan intensif, pemberdayaan usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan perizinan, sementara kebijakan diarahkan pada pemberian bantuan modal dan fasilitas usaha. Namun demikian, pemuda masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pendampingan, serta infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Merauke memiliki potensi besar di berbagai sektor ekonomi, sehingga pengembangan kewirausahaan pemuda menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan berfokus pada fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pemuda dalam mengelola usaha. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi terkait strategi pengembangan kewirausahaan pemuda. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data mengacu pada pendapat Sugiyono (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu

Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh dinas telah memberikan manfaat nyata bagi pemuda yang baru memulai usaha. Selain itu, pemuda juga melihat kewirausahaan sebagai peluang untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kemandirian ekonomi. SN mengungkapkan bahwa: “Saya sih pengennya bisa mandiri ya, bukan cuma ngandelin kerjaan formal saja...” (Wawancara, 28 Mei 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa misi dinas tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Merauke adalah menciptakan wirausahawan muda yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta penyediaan akses terhadap permodalan dan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang UKM, diketahui bahwa tujuan tersebut telah dirumuskan dalam rencana kerja tahunan dinas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan berikut: “...terbentur pada masalah anggaran... dan SDM nya masih kurang...” (Wawancara, 2 Juni 2025).

Selain itu, RS juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program kewirausahaan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kerja sama antara dinas dan pelaku usaha. Ia menyatakan bahwa: “...pelatihan yang diberikan itu tentang pengelolaan keuangan, *packaging*, dan bantuan dana modal untuk usaha...” (Wawancara, 28 Mei 2025).

Dari sisi pelaku usaha muda, tujuan berwirausaha umumnya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk mandiri. DK menyampaikan bahwa ia ingin mengembangkan usahanya agar dapat berkembang dari skala kecil ke skala yang lebih besar, meskipun menghadapi kendala dalam pencairan modal. “...saya sudah pernah ajukan bantuan modal... tapi dananya baru cair hampir setahun kemudian...” (Wawancara, 28 Mei 2025).

SN juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah pemasaran produk, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, SI menyoroti kendala dalam proses perizinan usaha yang dianggap cukup rumit.

Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh dinas telah sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha, namun dalam implementasinya masih diperlukan penyesuaian agar dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

3. Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke dalam pengembangan kewirausahaan pemuda mencakup berbagai langkah yang saling berkaitan, antara lain pelatihan, bantuan modal, promosi produk, serta pemanfaatan teknologi digital.

Dalam hal pelatihan, dinas secara rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku usaha. Hal ini disampaikan oleh PH: “Kami biasa membuat kegiatan pelatihan maupun sosialisasi...” (Wawancara, 2 Juni 2025).

Selain itu, dinas juga menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran. Strategi ini menunjukkan adanya upaya adaptif dari dinas dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal promosi, dinas memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan bazar sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. RS menyatakan bahwa:

“...kami adakan bazar korpri membantu mereka untuk mempromosikan produk...” (Wawancara, 28 Mei 2025). Selain itu, strategi digitalisasi juga mulai diterapkan melalui pemanfaatan sistem perizinan online (OSS). Dinas berperan dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi tersebut.

Dari sisi pelaku usaha, strategi ini memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha. DK menyatakan bahwa bantuan modal yang diperoleh sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan produksi. Sementara itu, SD mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan membantu dalam meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam hal pemahaman teknologi dan pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam pendampingan agar strategi yang diterapkan dapat berjalan secara optimal.

4. Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke dalam pengembangan kewirausahaan pemuda difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha serta pelatihan kewirausahaan. Kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), yang diperuntukkan bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP).

PH menyatakan bahwa: “Kebijakannya sementara ini hanya kepada pemberian bantuan modal usaha untuk pemuda OAP...” (Wawancara, 2 Juni 2025).

Kebijakan tersebut disusun melalui mekanisme perencanaan tahunan dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain itu, dinas juga melakukan monitoring terhadap pelaku usaha penerima bantuan melalui laporan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan belum adanya program pendampingan yang berkelanjutan. Dari sisi pelaku usaha, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mempermudah proses pengembangan usaha. DK menyampaikan bahwa proses pencairan bantuan masih memerlukan waktu yang cukup lama, sementara SN menekankan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis praktik. SI juga menyoroti perlunya kemudahan dalam proses perizinan usaha, khususnya bagi pemula.

Dengan demikian, kebijakan yang ada telah memberikan dasar bagi pengembangan kewirausahaan pemuda, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasi agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Pembahasan

1. Misi

Berdasarkan hasil wawancara, misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan muda yang mandiri, produktif, dan berdaya saing melalui pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha. Misi ini juga diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda serta mengoptimalkan potensi lokal sebagai basis pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wheelen dan Hunger (2002) yang menyatakan bahwa misi merupakan arah jangka panjang organisasi yang mencerminkan tujuan utama serta nilai yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, misi Dinas Perindakop tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pemuda sebagai agen perubahan.

Peneliti menilai bahwa misi tersebut sudah relevan dengan kebutuhan pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Merauke. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan penguatan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat serta integrasi aspek digitalisasi agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan pasar yang semakin kompetitif.

2. Tujuan

Menurut Wheelen dan Hunger (2002), tujuan merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan berfungsi sebagai arah operasional dari misi dan harus bersifat terukur serta realistis. Dalam penelitian ini, tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha muda melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pemberian bantuan modal. Tujuan ini juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi pemuda dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta hambatan administratif dalam proses perizinan dan pencairan bantuan. Selain itu, tujuan pelaku usaha muda yang cenderung bersifat praktis, seperti memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali terhambat oleh proses birokrasi yang belum optimal.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian antara tujuan yang telah dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan agar dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pelaku usaha muda.

3. Strategi

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke dalam pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi berbagai upaya, antara lain pelatihan kewirausahaan, promosi produk melalui kegiatan bazar, kerja sama lintas instansi, digitalisasi perizinan usaha melalui sistem OSS, serta pemberian bantuan modal usaha. Strategi ini menunjukkan adanya pendekatan yang cukup komprehensif dalam mendukung pengembangan usaha pemuda, baik dari aspek peningkatan kapasitas, akses pasar, maupun dukungan permodalan. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pelaku usaha, sementara kegiatan bazar menjadi sarana promosi produk lokal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui sistem OSS merupakan langkah strategis dalam mempermudah proses perizinan usaha. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama terkait keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha muda serta kompleksitas persyaratan administratif. Oleh karena itu, strategi yang telah diterapkan perlu didukung dengan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan efektivitas program serta memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pemuda.

4. Kebijakan

Menurut Wheelen dan Hunger (2002), kebijakan merupakan pedoman umum yang digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi untuk mendukung pencapaian strategi. Dalam hal ini, kebijakan Dinas Perindakop Kabupaten Merauke difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).

Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, kebijakan yang ada masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun keberlanjutan program. Selain itu, pelaku usaha muda masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan, seperti proses perizinan yang dianggap rumit serta pencairan bantuan modal yang memerlukan waktu cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh pelaku usaha muda, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Merauke.

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan secara merata. Kedua, pelatihan yang belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga belum mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha secara optimal. Ketiga, kurangnya pendampingan usaha setelah pelatihan maupun pemberian bantuan modal, yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Selain itu, proses perizinan usaha yang relatif rumit serta lambatnya pencairan bantuan modal menjadi kendala administratif yang cukup signifikan. Di sisi lain, program yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh kalangan pemuda juga menjadi hambatan dalam menciptakan pengembangan kewirausahaan yang inklusif. Kondisi tersebut secara keseluruhan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pemuda.

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pengembangan kewirausahaan pemuda antara lain adanya dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang memberikan peluang bagi pemuda, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk memperoleh bantuan modal usaha. Selain itu, komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Tersedianya pelatihan dasar kewirausahaan juga memberikan bekal awal bagi pemuda dalam mengelola usaha. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingginya antusiasme dan motivasi pemuda untuk berwirausaha, yang menjadi modal sosial dalam pengembangan usaha. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi dan proses perizinan usaha turut mendukung kemudahan akses informasi serta memperluas peluang pemasaran bagi pelaku usaha muda.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan kewirausahaan pemuda yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke telah menunjukkan adanya upaya dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang didukung oleh dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai pelaku ekonomi produktif

serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya jangkauan program kepada seluruh pemuda secara inklusif, pelatihan yang belum dilaksanakan secara berkelanjutan, serta terbatasnya pendampingan usaha setelah pemberian bantuan. Selain itu, proses perizinan usaha yang dinilai masih kurang efisien juga menjadi kendala bagi pemuda dalam mengembangkan usahanya secara lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas implementasi strategi melalui penguatan pendampingan usaha, penyederhanaan prosedur perizinan, serta perluasan akses program bagi seluruh kalangan pemuda. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2016). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management*. New Jersey: Pearson Education.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2002). *Strategic management and business policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.